



**PEMERINTAH KOTA  
TANJUNGPINANG**



**RENJA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggara pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Tanjungpinang, Juli 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Tanjungpinang



SAMSUDI, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720906 199403 1 006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada

penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA Perubahan OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- 4) Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.
- 16) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 17) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.
- 18) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Sebagai pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.
- 3) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

- 4) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- 5) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Tahun Anggaran 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa and Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2025 .

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

##### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi adalah untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

###### **A. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**

###### **1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tenis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :**

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.287.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.854.565,- atau tidak terserap sebesar 82.12%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%; dan 2) Jumlah ormas yang menerima hibah uang dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan hibah tidak dibayar.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.367.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.625.250,- atau tidak terserap sebesar 56.67%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah orang yang mengikuti rapat yang dibina dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya tunda bayar pada sub kegiatan.

## B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.994.500,- dan realisasi sebesar Rp. 91.100.000,- atau tidak terserap sebesar 55.12%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah koordinasi LAM yang difasilitasi dalam bentuk pertemuan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%; dan 2) Tersedianya honorarium LAM Kota Tanjungpinang. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan kepengurusan LAM dan jumlah pengurus yang baru lebih banyak dari pengurus sebelumnya sehingga tidak tersedia anggaran honorarium untuk 12 bulan.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Monitoring dan Pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau tidak terserap sebesar 80%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah koordinasi LAM yang difasilitasi dalam bentuk pertemuan dengan capaian indikator

kinerja sebesar 100%; dan 2) Tersedianya honorarium LAM Kota Tanjungpinang. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan kepengurusan LAM dan jumlah pengurus yang baru lebih banyak dari pengurus sebelumnya sehingga tidak tersedia anggaran honorarium untuk 12 bulan.

- c. Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.410.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.600.000,- atau tidak terserap sebesar 89.35%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah laporan hasil pembinaan anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilantik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan juknis terkait pelantikan anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilaksanakan.
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilantik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan juknis terkait pelantikan anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilaksanakan.
- e. Sub Kegiatan Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.515.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilantik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan juknis terkait pelantikan anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilaksanakan.

### C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.747.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.869.000,- atau tidak terserap sebesar 50.12%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya pencairan tunda bayar.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.9953.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.965.500,- atau tidak terserap sebesar 50.28%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya pencairan tunda bayar.
- c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggarannya harus dihapuskan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.858.000,- dan realisasi sebesar Rp. 199.876.000,- atau tidak terserap sebesar 51.35%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah bahan logistic kantor sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya anggaran tunda bayar.
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah unit peralatan dan mesin lainnya

sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggarannya harus dihapuskan.

- f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah unit peralatan dan mesian lainnya sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggarannya harus dihapuskan.

## **2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.520.905.936,- dan realisasi sebesar Rp. 4.449.145.937,- atau terserap sebesar 98.41%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%); dan 2) Tersedianya tambahan penghasilan ASN dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%). Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya pembayaran gaji ASN dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.818.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.138.000,- atau terserap sebesar 91.30%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya peralatan rumah tangga dengan capaian indicator kinerja 12 bulan (100%). Faktor pendorong

atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya peralatan rumah tangga dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.608.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.836.000,- atau terserap sebesar 76.68%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya barang dan cetak dan penggandaan dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.440.000,- atau terserap sebesar 96.00%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan pengetahuan serta integritas para pegawai untuk bekerja secara optimal.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 134.678.000,- dan realisasi sebesar Rp. 103.607.138,- atau terserap sebesar 76.93%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.515.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.920.200,- atau terserap sebesar

91.83%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 268.535.600,- dan realisasi sebesar Rp. 260.750.124,- atau terserap sebesar 97.10%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.

3. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.991.000,- dan realisasi sebesar Rp. 22.852.075,- atau terserap sebesar 81.64%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.808.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.435.000,- atau terserap sebesar 63.94%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan tersedianya dokumen dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah.

B. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.335.744.770,- dan realisasi sebesar Rp. 1.327.343.370,- atau terserap sebesar 99,37%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah partai politik mendapat bantuan keuangan dengan capaian indikator kinerja 10 partai politik (100%); dan 2) Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan wawasan dengan capaian indikator kinerja 90 orang (100%).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.391.252.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.387.462.000,- atau terserap sebesar 99,97%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dengan capaian indikator kinerja 100%.; dan 2) Jumlah ormas yang mendapat hibah bansos dengan capaian indikator kinerja 90 orang 100%.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.466.000,- dan realisasi sebesar

Rp. 32.006.000,- atau terserap sebesar 98.58%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dengan capaian indikator kinerja 100%; dan 2) Jumlah ormas yang mendapat hibah bansos dengan capaian indikator kinerja 100%.

C. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.434.000,- dan realisasi sebesar Rp. 79.791.700,- atau terserap sebesar 70.97%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan capaian indikator kinerja 243 orang (100%).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 159.045.000,- dan realisasi sebesar Rp. 137.495.762,- atau terserap sebesar 86.45%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan capaian indikator kinerja 151 orang (100%).

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.892.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.979.34,- atau terserap sebesar 60.15%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan capaian indikator kinerja sebanyak 4 laporan (100%).

D. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.

1. Kegiatan, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.960.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.816.871,- atau terserap sebesar 98.56%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan serta penanganan konflik di daerah dengan capaian indikator kinerja 120 orang (100%).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.210.000,- dan realisasi sebesar Rp. 251.4688.500,- atau terserap sebesar 95.90%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

serta penanganan konflik di daerah dengan capaian indikator kinerja 414 orang (100%).

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 135.113.000,- dan realisasi sebesar Rp. 134.823.500,- atau terserap sebesar 99.79%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan serta penanganan konflik di daerah dengan capaian indikator kinerja 60 laporan (100%).
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.666.354.400,- dan realisasi sebesar Rp. 3.402.796.940,- atau terserap sebesar 92.81%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah dengan capaian indikator kinerja 4 dokumen (100%).

### **2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :**

Seluruh program/kegiatan tidak ada yang melebihi target, karena semuanya sesuai dengan rencana target yang telah ditentukan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 (SEMESTER II)

OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd dan APBD Tahun 2022				Target Kinerja dan Anggaran RKPd dan APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (%)				
				Satuan Indikator	RKPd		APBD		Satuan Indikator	RKPd Perubahan		APBD Perubahan		I		II		III		IV		15 = 11 + 12 + 13 + 14		16 = 15 / 10 * 100		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			12.771.275.593		13.912.827.084			13.912.827.084		20.166.684.632			1.146.932.902		3.907.010.329			2.609.784.271		12.009.423.213		19.673.150.715	94,15	97,55
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			12.771.275.593		13.912.827.084			13.912.827.084		20.166.684.632			1.146.932.902		3.907.010.329			2.609.784.271		12.009.423.213		19.673.150.715	94,15	97,55
	8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			12.771.275.593		13.912.827.084			13.912.827.084		20.166.684.632			1.146.932.902		3.907.010.329			2.609.784.271		12.009.423.213		19.673.150.715	94,15	97,55
	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.283.688.259		5.663.237.238			5.663.237.238		5.787.929.361			1.103.123.402		1.649.481.463			1.195.109.071		1.466.168.113		5.413.882.049	101,10	93,54
	801012, 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.500.000		9.000.000			9.000.000				-		-		-				7.878.000		7.878.000		
	8,010,1 20,101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan OPD	Do kumen	1	16,500,000	1	3,000,000	Do kumen	1	3,000,000	1	2,700,000	-	-	-	1	0	0	2,616,000	1	2,616,000	100	96.89		

8,010,1 20,107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan OPD	Dokumen	1	22,000,000	1	6,000,000	Dokumen	1	6,000,000	1	5,400,000	1	-	0	0	0	5,262,000	1	5,262,000	100	97.44		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100	97.26			
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST			
801012,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.600.000.000		3.294.898.738			4.084.635.219		4.272.222.635		534.719.276		1.417.714.273		975.197.979		1.161.608.881		4.089.240.409		
8,010,1 20,201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	350	3,809,409,959	350	4,162,856,195	Bulan	350	4,162,856,195	350	4,335,201,134	86	945,988,231	138	1,388,709,608	78	920,456,401	75	904,616,716	377	4,159,770,956	107.71	95.95
		Tersedianya tambahan penghasilan ASN	Bulan	12		12		Bulan	12		14		1		6		2		5		14	100,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				107.71	95.95			
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST			
801012,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				763.623.300		959.719.883			959.719.883		900.307.583		89.832.647		158.618.819		150.060.134		329.029.449		727.541.049		
8,010,1 20,603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan	4	44,000,000	12	14,518,000	Bulan	12	14,518,000	1	14,518,000	0	0	1	1,723,500	0	0	0	9,326,500	1	11,050,000	100	76.11
8,010,1 20,604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya kebutuhan bahan logistik	Bulan	1	77,000,000	12	79,963,808	Bulan	12	79,963,808	4	79,960,408	0	0	1	21,210,000	1	18,833,200	2	24,779,400	4	64,822,600	100	81.07
8,010,1 20,605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	4	77,000,000	12	82,233,500	Bulan	12	82,233,500	3	82,233,500	0	0	1	18,757,224	0	0	2	53,517,860	3	72,275,084	100	87.89
8,010,1 20,606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	10,000,000	12	10,000,000	Bulan	12	10,000,000	3	0	3	720,000	3	840,000	3	1,800,000	12	3,360,000	100	33.6	12	10,000,000
8,010,1 20,609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	532,623,300	12	773,004,575	Bulan	12	773,004,575	12	713,595,675	3	89,832,647	3	116,208,095	3	130,386,934	3	239,605,689	12	576,033,365	100	80.72

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	80,81	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	T	
801012,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.800.000		35.264.500			35.264.500		35.264.500					5.600.000		29.400.000		35.000.000			
8,010,120,706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	unit	2	173,800,000	3	35,264,500	unit	3	35,264,500	3	35,264,500					1	5,600,000	2	29,400,000	3	35,000,000	100	99,25
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	99,25	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	
801012,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				366.355.000		313.296.660			313.296.600		329.526.144		50.502.524		885.353.036		75.601.536		112.595.048		324.052.144		
8,010,120,802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Bulan	12	71,500,000	12	11,415,000	Bulan	12	11,415,000	12	26,670,000	3	1,901,500	3	1,201,500	3	2,700,000	3	15,393,000	12	21,196,000	100	79,48
8,010,120,804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	294,855,000	12	301,881,660	Bulan	12	294,855,000	12	301,881,660	12	301,881,660	12	302,856,144	3	48,601,024	3	84,151,536	3	72,901,536	3	97,202,048
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	98,34	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	
801012,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.000.000		174.700.000			174.700.000		171.130.000		16.800.000		16.800.000		35.047.000		82.648.900		151.295.900		
8,010,120,901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	1	77,000,000	12	157,240,000	Bulan	12	157,240,000	8	153,670,000	2	16,800,000	2	16,800,000	2	30,117,000	2	72,498,900	8	136,215,900	100	88,64
8,010,120,906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	20	55,000,000	12	17,460,000	Bulan	12	17,460,000	26	17,460,000	0	0	0	-	10	4,930,000	16	10,150,000	26	15,080,000	100	86,37
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	88,41	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	T	

8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.293.966.568		1.410.782.200			1.410.782.200		1.410.782.200		5.935.000		114.160.000		816.219.200		486.191.300		1.422.505.500	100,00	95,45
801022,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.293.966.568		1.410.782.200			1.410.782.200		1.410.782.200		5.935.000		114.160.000		816.219.200		486.191.300		1.422.505.500		
8,010,2 20,103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan	ora ng	300	636,566,568	249	16,976,000	ora ng	249	16,976,000	249	17,110,000	50	2,450,000	50	-	50	2,450,000	99	11,730,000	249	16,630,000	100	97,19
8,010,2 20,104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi yang dilakukan internal maupun eksternal	ora ng	480	422,400,000	159	1,366,081,000	ora ng	159	1,366,081,000	159	1,447,615,500	70	3,485,000	0	114,160,000	40	813,769,200	49	449,716,300	159	1,381,130,500	100	95,41
8,010,2 20,106	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga	kel uar ga	150	235.000.000	150	27.725.200	kel e l u a r g a	150	27.725.200	150	25.560.125	0	-	0	-	0	-	150	24.745.000	150	24.745.000	100,00	96,81
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	95,45	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				2.053.046.766		4.207.385.646			4.207.385.646		10.211.010.646		5.400.000		1.280.473.646		5.400.000		8.908.520.000		10.199.793.646	100,00	99,89
801032,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai				2.053.046.766		4.207.385.646			4.207.385.646		10.211.010.646		5.400.000		1.280.473.646		5.400.000		8.908.520.000		10.199.793.646		

		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																							
8,010,3 20,103		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	Orang	680	1.350.165.646	30	1.259.665.646	Orang	30	1.259.665.646	30	1.259.665.646	30	1.256.623.646	0	1.440.000	30	1.258.063.646	100,00	99,87				
8,010,3 20,104		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	80	356.012.520	35	2.913.870.000	Orang	35	2.913.870.000	30	8.927.210.000	30	18.450.000	0	8.901.680.000	30		100,00					
8,010,3 20,105		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik di daerah	Dokumen	26	346.868.600	12	33.850.000	Laporan	12	33.850.000	12	24.135.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000	12	21.600.000	100,00	89,50





8,010,6 20,105	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil	Do ku me n	12	430.000.000	60	135.865.000	l a p o r a n	60	135.865.000	60	135.865.000	15	15	64.510.000	15	15	70.114.000	60	134.624.000	100,00	99,09	
8,010,6 20,106	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Do ku me n	4	800.000.000	4	1.998.505.000	D o k u m e n	4	1.998.505.000	4	2.053.504.000	1	1	657.251.220	1	472.246.000	1	918.565.000	4	2.048.062.220	100,00	99,74
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	99,47		
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST		
<b>JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>												20.166.684.632	<b>JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>							19.673.150.715			
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																				94,15	97,55		
<b>PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																				ST	ST		

## 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan;
- Sekretariat, terdiri atas;
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, terdiri atas :  
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :  
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



	kewajibannya (tidak berkonflik)	partai dan Ormas yang terdaftar dikali 100													
6	Persentase Keikutsertaan partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang aman dan damai	Jumlah anggota Partai Politik dan ORMAS yang aktif berdemokrasi dibagi jumlah anggota partai politik dan ORMAS yang ada di kali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Konflik pemilu tertangani	Jumlah Potensi konflik pemilu tertangani di bagi dengan jumlah Potensi Konflik di kali 100	%	100	0	0	100	100	-	-	100	100	-	-	-
8	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) dikali 100	%												
		- Pileg	%				72,97				104,24				
		- Pilpres	%				73,35				112,85				
		- Pilgub	%	60				62,15				103,58			
9	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah dibagi realisasi keuangan perangkat daerah dikali 100	%	92,80	96,40	97,56	77,71	95,53	96,40	92,67	80,78	102,94	100	94,99	94,99
10	Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	Jumlah kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung di bagi jumlah yang tersedia tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di bagi jumlah yang tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur dikali 100	%	100	100	100	100	100	88,57	100	100	100	88,57	100	100
12	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan tersusun tepat waktu di bagi Jumlah laporan Keuangan yang harus tersusun di kali 100	%	92	93	94	100	100	100	100	109,89	108,70	107,53	106,38	106,38



# STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang**

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

#### **A. Isu-isu Penting terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang**

1. Pengaruh dari informasi media sosial yang salah akan mengakibatkan pengaruh dan dampak yang jelek dimasyarakat dan informasi tersebut bersifat hoax, yang informasinya tidak mempunyai kebenaran yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Keanekaragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama serta adat istiadat yang berbeda dapat menimbulkan konflik dan pertikaian dilingkungan masyarakat.
3. Rawannya kondisi Kota Tanjungpinang yang dipengaruhi letak geografis sebagai daerah transit yang berdekatan dengan negara tetangga yang akan mengakibatkan masuknya pengaruh-pengaruh asing yang bersifat negative bagi daerah maupun seluruh kedaulatan NKRI.

#### **B. Isu-isu Penting terkait Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

1. Belum optimalnya penyaluran dana hibah Ormas
2. Belum optimalnya kebijakan perwako terkait petunjuk pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Dianggap penting untuk membangun jaringan aplikasi yang berbasis peningkatan pelayanan pendaftaran serta informasi terhadap ormas
4. Pentingnya membangun hubungan kemitraan antara pemerintah Kota Tanjungpinang kepada seluruh ormas yang berada pada wilayah administrasi pemerintah Kota Tanjungpinang
5. Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat

6. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita dalam Pemilu.
7. Dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum

C. Isu-isu Penting terkait Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

1. Dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Pengurus FKUB untuk mewujudkan kerukunan antar agama sesuai aturan yang ada
2. Sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar dan masyarakat se-Kota Tanjungpinang
3. Pelaksanaan test urine bagi ASN dan masyarakat
4. Dialog tokoh agama dan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama
5. Pemetaan rumah ibadah di Kota Tanjungpinang
6. Pembuatan peraturan daerah P4GN Kota Tanjungpinang

D. Isu-isu Penting terkait Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Tim FKDM dalam memberikan dan mengumpulkan data yang akurat untuk disamakan kepada Pemerintah
2. Pentingnya untuk menerbitkan SK Walikota dan pembuatan rencana Perwako tentang FKDM agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Permasalahan terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
2. belum optimalnya inventarisasi ketatausahaan dan kepegawaian
3. belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah
4. belum optimalnya penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Unit (RKPBU)

5. belum optimalnya kebijakan penyusunan dokumen berita acara pemeriksaan, pinjam pakai, penerimaan, penolakan dan pengeluaran barang-barang inventaris
6. belum optimalnya kegiatan inventarisasi asset sekretariat daerah sesuai KIB.
7. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
8. Belum optimalnya pengelolaan program anggaran dan keuangan dikarenakan adanya pergantian sistem ke SIPD
9. Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan dikarenakan tidak ditunjang oleh sistem yang ada/berlaku

## 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

TAHUN 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>Rp12.459.272.067</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>Rp12.459.272.067</b>
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>Rp12.459.272.067</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>Rp12.459.272.067</b>
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>Rp12.459.272.067</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>Rp12.459.272.067</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</b>	<b>72 Skor</b>	<b>Rp8.059.272.067</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</b>	<b>72 Skor</b>	<b>Rp8.059.272.067</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp431.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp431.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp16.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp16.800.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp78.799.397	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp78.799.397		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp78.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp78.750.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp78.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp78.750.000		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp157.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp157.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	Rp23.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	Rp23.100.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	94%	Rp4.635.833.767	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	94%	Rp4.635.833.767	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bulan	Rp4.710.125.455	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bulan	Rp4.710.125.455	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp52.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp52.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp105.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp105.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tersedianya dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp52.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tersedianya dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp52.500.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp52.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp52.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Rp27.720.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Rp27.720.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44 Paket	Rp13.880.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44 Paket	Rp13.880.000	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	Rp13.880.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	Rp13.880.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Rp1.175.704.465	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Rp1.175.704.465	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp52.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp52.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp250.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp46.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp46.200.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp80.850.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp80.850.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp80.650.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp80.650.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp34.650.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp34.650.000	
Penyediaan Bahan/Material	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp18.900.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp18.900.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp559.254.485	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp559.254.485	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp52.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp52.500.000	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Rp	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp775.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp775.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp100.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp100.000.000	
Pengadaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	Rp262.500.000	Pengadaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	Rp262.500.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Rp262.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Rp262.500.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp100.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	100 %	Rp463.422.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	100 %	Rp463.422.750	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp75.075.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp75.075.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp78.750.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp78.750.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp309.597.750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp309.597.750	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	7%	Rp265.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	7%	Rp265.600.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Rp80.850.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Rp80.850.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Rp7.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Rp7.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Rp57.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Rp57.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp20.000.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa</b>	<b>100 % 30 %</b>	<b>Rp1.150.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa</b>	<b>100 % 30 %</b>	<b>Rp1.150.000.000</b>	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2 Dokumen	Rp1.150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2 Dokumen	Rp1.150.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	Rp	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	Rp	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	Rp	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	Rp	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	105 Orang	Rp105.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	105 Orang	Rp105.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190 Orang	Rp940.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190 Orang	Rp940.000.000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	Rp31.500.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	Rp31.500.000	

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Tanjungpinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	180 Keluarga	Rp73.500.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Tanjungpinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	180 Keluarga	Rp73.500.000	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	Rp	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	Rp	
	Pembentukan Paskibraka	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paskibraka	0 Orang	Rp	Pembentukan Paskibraka	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paskibraka	0 Orang	Rp	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	Rp	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	Rp	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	Rp	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	Rp	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	Rp	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	Rp	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp2.400.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp2.400.000.000</b>	



	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35 Orang	Rp300.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35 Orang	Rp300.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Rp400.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Rp400.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Orang	Rp	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Orang	Rp	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>22%</b>	<b>Rp330.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>22%</b>	<b>Rp330.000.000</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 Dokumen	Rp330.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 Dokumen	Rp330.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Rp	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Rp	

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	50 Dokumen	Rp50.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	50 Dokumen	Rp50.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Rp180.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Rp180.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Rp100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Rp100.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	Rp	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	Rp	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama 2. Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya</b>	<b>80 % 5 %</b>	<b>Rp220.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama 2. Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya</b>	<b>80 % 5 %</b>	<b>Rp220.000.000</b>	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2 Dokumen	Rp220.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2 Dokumen	Rp220.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Rp	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Rp	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Rp40.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Rp40.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	286 Orang	Rp30.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	286 Orang	Rp30.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	151 Orang	Rp130.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	151 Orang	Rp130.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	1 Laporan	Rp20.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	1 Laporan	Rp20.000.000	

	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp300.000.000</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Dokumen	Rp300.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Dokumen	Rp300.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Rp50.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Rp50.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	Rp50.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	Rp50.000.000	

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	Rp50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	Rp50.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	486 Orang	Rp50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	486 Orang	Rp50.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	Rp50.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	Rp50.000.000	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp50.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp50.000.000	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru, dalam hal penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 tidak memuat visi maupun misi dari kepala daerah, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 didasarkan pada penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tanjungpinang tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, serta regulasi yang berlaku, yang selanjutnya menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
  - b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan;
  - c. Meningkatnya Pembangunan Gender; dan
  - d. Terwujudnya Ketahanan Pangan.
2. Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
  - b. Terkendalinya Laju Inflasi;
  - c. Menurunnya Tingkat Pengangguran; dan
  - d. Menurunnya Angka Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan; dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
  - b. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah; dan
  - c. Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
4. Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif), dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
  - b. Meningkatnya Daya Saing Daerah.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Tanjungpinang mendukung Tujuan yang ke 4 yaitu “Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif) dengan Sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah”.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

#### **Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

**“Meningkatkan Kondusifitas Wilayah untuk Menunjang Kinerja Pembangunan Kota Tanjungpinang.”**

### Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah sebagai berikut :

“Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Menjaga Toleransi Kerukunan dan Kerjasama Antar Umat Beragama, Ketahanan Sosial, Pendidikan Politik Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Nasional di Daerah.”

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

#### Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
			2024	2025	2026
1	Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang	Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	96	97	98
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	65	-	-
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	100	100	100

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah

ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan capaian organisasi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - 1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material
- 1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.6.2 Pengadaan Mebel
  - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 1.6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.8.2 Pemeliharaan Mebel
  - 1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan :
  - 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :
    - 2.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 2.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 2.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 2.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 2.1.5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 2.1.6 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
    - 2.1.7 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
    - 2.1.8 Pembentukan Paskibraka
    - 2.1.9 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
    - 2.1.10 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
    - 2.1.11 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan :
  - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan :

- 3.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - 3.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - 3.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - 3.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - 3.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan :
- 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :
    - 4.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- 4.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :
  - 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :
    - 5.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
    - 5.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
    - 5.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
    - 5.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
    - 5.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan :
  - 6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :
    - 6.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - 6.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - 6.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - 6.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - 6.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - 6.1.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.459.272.067,00				14.639.272.067,00			
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					12.459.272.067,00				14.639.272.067,00			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.459.272.067,00				14.639.272.067,00			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.059.272.067,00				8.059.272.067,00			
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					431.699.397,00				354.300,00			
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Dokumen	100 %	16.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.800.000,00
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Dokumen	100 %	76.799.397,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	82.500.000,00

8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Dokumen	100 %	78.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	82.500.000,00
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Dokumen	100 %	78.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	82.500.000,00
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	5 Laporan	100 %	157.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	65.000.000,00

8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	5 Laporan	100 %	23.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24.200.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.867.625.455,00				5.035.455.937,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	384 Orang	100 %	4.710.125.455,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	384 Orang	4.945.455.937,00
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Laporan	100 %	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000,00

8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Laporan	100 %	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	60.000.000,00
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								52.500.000,00				56.000.000,00
8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	55.000.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								27.720.000,00				29.040.000,00
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	42 Paket	100 %	13.860.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	14.520.000,00
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	72 Skor	44 Orang	100 %	13.860.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	44 Orang	14.520.000,00

						Pendidikan dan Pelatihan	perangkat daerah	Semua Kel/Desa						dan Pelatihan		
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.175.704.465,00				1.219.785.630,00
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Paket	100 %	52.500.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.000.000,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Paket	100 %	250.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Paket	100 %	46.200.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	46.400.000,00
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	3 Paket	100 %	80.850.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	84.700.000,00

8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Paket	100 %	80.850.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	84.700.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Dokumen	100 %	34.650.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	36.300.000,00
8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Paket	100 %	18.900.000,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.800.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Laporan	100 %	559.254.465,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	585.885.630,00
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Dokumen	100 %	52.500.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	55.000.000,00

8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Dokumen	100 %	0,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								775.000.000,00			800.000.000,00
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	100 %	100.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	29 Unit	100 %	262.500.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	275.000.000,00
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	18 Unit	100 %	262.500.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	225.000.000,00
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	72 Skor	5 Unit	100 %	100.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	0,00

							Lainnya yang Disediakan		Semua Kel/Desa						yang Disediakan		
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	100 %	50.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								463.422.750,00				485.490.500,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Laporan	100 %	75.075.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	78.850.000,00
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Laporan	100 %	78.750.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.500.000,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	72 Skor	12 Laporan	100 %	309.597.750,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	324.340.500,00

							yang Disediakan	perangkat daerah	Semua Kel/Desa						Kantor yang Disediakan		
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								265.600.000,00				280.200.000,00
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	8 Unit	6 %	80.850.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	84.700.000,00
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	6 %	7.000.000,00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	26 Unit	6 %	57.750.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	60.500.000,00
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	6 %	50.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	50.000.000,00

8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	6 %	50.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	6 %	20.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	25.000.000,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							1.150.000.000,00				2.580.000.000,00	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							1.150.000.000,00					2.580.000.000,00
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	2 Dokumen	100%	0,00		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Dokumen	0,00

															yang Disusun		
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	0,00
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	105 Orang	2 Dokumen	105.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	274 Orang	300.000.000,00

8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	190 Orang	2 Dokumen	940.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190 Orang	1.930.000.000,00
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	1 Laporan	1 Laporan	31.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	150.000.000,00

8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	180 Keluarga	2 Dokumen	73.500.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	180 Keluarga	200.000.000,00
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	0,00

						dan karakter bangsa											
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Paskibraka	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	0 Orang	0 Dokumen	0,00		Jumlah Paskibraka	0 Orang	0,00
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	%	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0,00
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	%	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka	1 Dokumen	0,00

					Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa		Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kel/Desa						raka Duta Pancasila		
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibra raka Duta Pancasila	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Purnapaskibra raka Duta Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	%	0 Orang	0 Dokumen	0,00	Jumlah Purnapaskibra raka Duta Pancasila	0 Orang	0,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							2.400.000.000,00			3.000.000.000,00	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							2.400.000.000,00			3.000.000.000,00	
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	1 Dokumen	200.000,00

					Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	%	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	1 Dokumen	70.000.000,00

							di Daerah yang Disusun							Situasi Politik di Daerah yang Disusun		
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	%	90 Orang	3 Dokumen	1.700.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	90 Orang	2.000.000.000,00
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35 Orang	3 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	35 Orang	300.000.000,00

					Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	3 Dokumen	400.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	12 Laporan	430.000.000,00

					Situasi Politik di Daerah		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik							Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Persentase Pelaksanaan Tugas Paskibaraka Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Paskibaraka Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Paskibaraka Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	%	0 Laporan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Pelaksanaan Tugas Paskibaraka Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Daerah	12 Laporan	0,00
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							330.000.000,00				360.000.000,00	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							330.000.000,00				360.000.000,00	
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	%	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	0 Dokumen	0,00

					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun							Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 %	2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	60.000.000,00
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 %	50 Orang	3 Dokumen	180.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	50 Orang	200.000.000,00

							Ormas Asing di Daerah								Ormas Asing di Daerah		
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 %	50 Orang	3 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	100.000.000,00
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 %	0 Laporan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	0,00
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								220.000.000,00				240.000.000,00
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								220.000.000,00				240.000.000,00

8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 5 %	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	1 Dokumen	40.000.000,00

					Kepercayaan di Daerah										di Daerah yang Disusun		
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 5 %	286 Orang	2 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	286 Orang	40.000.000,00
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 5 %	151 Orang	2 Dokumen	130.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	151 Orang	140.000.000,00

					Kepercayaan di Daerah		Penghayat Kepercayaan di Daerah							Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 5 %	1 Laporan	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							300.000.000,00			400.000.000,00		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							300.000.000,00			400.000.000,00		
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	1 Dokumen	50.000.000,00	

					Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Penanganan Konflik Sosial							Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	3 Dokumen	50.000.000,00	

					Konflik di Daerah		Konflik di Daerah yang Disusun							Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	120 Orang	5 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	75.000.000,00
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	100 %	486 Orang	5 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan	486 Orang	75.000.000,00

					Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Semua Kel/Desa								n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Laporan	5 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	60 Laporan	75.000.000,00		

					serta Penanganan Konflik di Daerah		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	75.000.000,00
<b>Total Pagu</b>												<b>12.459.272.067,00</b>		<b>14.639.272.067,00</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 memuat hasil yang ingin dicapai selama satu tahun yang tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kerjanya.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

#### **SARAN**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana kerja ini dengan baik.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun merupakan gambaran satu tahun kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Perubahan Rencana ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan sehingga dapat berjalan optimal.

Tanjungpinang, Juli 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Tanjungpinang



SAMSUDI, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720906 199403 1 006